



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. www.pta-surabaya.go.id, ptasurabaya@gmail.com

Nomor : 3900/KPTA.W13-A/OT1.6/VIII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Publikasi QR Code
Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025

Surabaya, 08 Agustus 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama
(terlampir)
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 14358/SEK.PW1.1.1/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 hal Publikasi QR Code Survei Penilaian Integritas 2025 dan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1403/DJA/HM1.1./VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025 hal Himbauan Publikasi dan Kampanye SPI Mahkamah Agung 2025, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 dilakukan selama periode Juli sampai dengan Oktober 2025;
2. Untuk meningkatkan persentase pengisian survei oleh responden eksternal, maka unit kerja diperintahkan untuk mempublikasikan QR code pengisian survei (<https://bit.ly/EKS-SPIMARI25>) di area pelayanan sampai dengan 30 Oktober 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. QR code dipergunakan untuk pengisian survei responden eksternal masyarakat penerima layanan atau rekanan/ penyedia ada unit kerja;
 - b. Bagi unit kerja yang tidak memiliki layanan publik, maka responden eksternal dimaksimalkan terhadap rekanan/ penyedia yang pernah bekerja sama dengan unit kerja tersebut;
 - c. QR code digunakan oleh seluruh unit eselon I dan satuan kerja yang terpilih menjadi sampel acak dalam pelaksanaan SPI 2025 (terlampir);
 - d. Pengadilan Tingkat Pertama menggunakan QR code Pengadilan Tingkat Banding masing-masing; dan

- e. Satuan kerja dapat menggunakan desain *background QR code* dalam format yang *editable* yang dapat diakses pada tautan berikut:

Guideline : <https://bit.ly/GuidelineQRCode>

Google Drive : <https://bit.ly/GoogleDriveQRcode>

Link Canva Design : <https://bit.ly/QRcodeSPI>

Link terlampir tersedia dalam berbagai format, antara lain JPG, SVG, AI, DOC, PDF, dan PSD sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja. Di dalamnya juga sudah terdapat panduan/ *guideline* pembuatan *QR code*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pin. Ketua

Saherudin ✓

Lampiran : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya
Nomor : 3900/WKPTA.W13-A/OT1.6/VIII/2025
Tanggal : 06 Agustus 2025

No.	Satuan Kerja
1	Pengadilan Agama Bojonegoro
2	Pengadilan Agama Kab. Kediri
3	Pengadilan Agama Kab. Malang
4	Pengadilan Agama Tulungagung
5	Pengadilan Agama Bangil
6	Pengadilan Agama Jombang
7	Pengadilan Agama Magetan
8	Pengadilan Agama Pacitan
9	Pengadilan Agama Pamekasan
10	Pengadilan Agama Situbondo
11	Pengadilan Agama Trenggalek
12	Pengadilan Agama Kangean



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14358/SEK/PW1.1.1/VIII/2025 Jakarta, 1 Agustus 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Publikasi QR Code Survei Penilaian Integritas 2025

- Yth
1. Para Sekretaris Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Terlampir;
 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Terlampir.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Mahkamah Agung RI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 dilakukan selama periode **Juli** sampai dengan **Oktober 2025**;
2. Untuk meningkatkan persentase pengisian survei oleh responden eksternal maka unit kerja diperintahkan untuk memublikasikan QR Code Pengisian Survei (<https://bit.ly/EKS-SPIMARI25>) di area pelayanan sampai dengan 30 Oktober 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. QR Code dipergunakan untuk pengisian survei responden eksternal masyarakat penerima layanan atau rekanan/penyedia pada unit kerja;
 - b. Bagi unit kerja yang tidak memiliki layanan publik, maka responden eksternal dimaksimalkan terhadap rekanan/penyedia yang pernah bekerja sama dengan unit kerja tersebut;
 - c. QR Code digunakan oleh seluruh unit eselon I dan satuan kerja yang terpilih menjadi sampel acak dalam pelaksanaan SPI 2025 (terlampir);
 - d. Pengadilan Tingkat Pertama menggunakan QR Code Pengadilan Tingkat Banding masing-masing;
 - e. Satuan kerja dapat menggunakan desain *background* QR Code dalam format yang *editable* yang dapat diakses pada tautan berikut:

Guideline : <https://bit.ly/GuidelineQRCode>
Google Drive : <https://bit.ly/GoogleDriveQRcode>
Link Canva Design : <https://bit.ly/QRcodeSPI>

Link terlampir tersedia dalam berbagai format, antara lain JPG, SVG, AI, DOC, PDF, dan PSD, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja.

Di dalamnya juga sudah terdapat panduan/*guideline* pembuatan QR Code.

3. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Hendra (0812-9584-246) atau Sdr. Syarif (0821-2213-7785).

Survei Penilaian Integritas (SPI) Mahkamah Agung RI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atas risiko korupsi, memetakan risiko korupsi, dan mengukur integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, agar Mahkamah Agung RI dapat merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem antikorupsi sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, Pimpinan Mahkamah Agung memerintahkan seluruh warga peradilan turut menyukseskan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Mahkamah Agung RI 2025.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto



Lampiran
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Republik Indonesia
 Nomor : 14358/SEK/PW1.1.1/VIII/2025
 Tanggal : 1 Agustus 2025

DAFTAR SATUAN KERJA SAMPEL ACAK SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS 2025

NO	SATUAN KERJA
1	KAMAR PEMBINAAN
2	KAMAR PERDATA
3	KAMAR MILITER
4	KAMAR TATA USAHA NEGARA
5	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
6	KEPANITERAAN
7	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
8	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
9	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
11	BADAN PENGAWASAN
12	PENGADILAN PAJAK
13	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
14	PENGADILAN TINGGI GORONTALO
15	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
16	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
17	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
18	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
19	PENGADILAN TINGGI RIAU
20	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT
21	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
22	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
23	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
24	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
25	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
26	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

NO	SATUAN KERJA
27	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
28	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
29	PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
30	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
31	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
32	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
33	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
34	PENGADILAN NEGERI BANDUNG
35	PENGADILAN NEGERI BEKASI
36	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
37	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
38	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
39	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
40	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
41	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
42	PENGADILAN NEGERI MEDAN
43	PENGADILAN NEGERI SEMARANG
44	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
45	PENGADILAN NEGERI SURABAYA
46	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
47	PENGADILAN NEGERI TANGERANG
48	PENGADILAN NEGERI AMBON
49	PENGADILAN NEGERI DENPASAR
50	PENGADILAN NEGERI JEMBER
51	PENGADILAN NEGERI KENDARI
52	PENGADILAN NEGERI MANADO
53	PENGADILAN NEGERI MATARAM
54	PENGADILAN NEGERI PADANG
55	PENGADILAN NEGERI PALU
56	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
57	PENGADILAN NEGERI SLEMAN

NO	SATUAN KERJA
58	PENGADILAN NEGERI TEGAL
59	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
60	PENGADILAN NEGERI BANGIL
61	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
62	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
63	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
64	PENGADILAN NEGERI BARABAI
65	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU
66	PENGADILAN NEGERI BITUNG
67	PENGADILAN NEGERI BLORA
68	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
69	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
70	PENGADILAN NEGERI DEMAK
71	PENGADILAN NEGERI DOMPU
72	PENGADILAN NEGERI DONGGALA
73	PENGADILAN NEGERI GIANJAR
74	PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
75	PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
76	PENGADILAN NEGERI KEDIRI
77	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
78	PENGADILAN NEGERI LUWUK
79	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
80	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
81	PENGADILAN NEGERI NGANJUK
82	PENGADILAN NEGERI PACITAN
83	PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
84	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN
85	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
86	PENGADILAN NEGERI PRAYA
87	PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
88	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT

NO	SATUAN KERJA
89	PENGADILAN NEGERI REMBANG
90	PENGADILAN NEGERI SALATIGA
91	PENGADILAN NEGERI SAMBAS
92	PENGADILAN NEGERI SAMPANG
93	PENGADILAN NEGERI SORONG
94	PENGADILAN NEGERI SUBANG
95	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
96	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
97	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
98	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
99	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG
100	PENGADILAN NEGERI BANJAR
101	PENGADILAN NEGERI BANTAENG
102	PENGADILAN NEGERI BATULICIN
103	PENGADILAN NEGERI BELOPA
104	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
105	PENGADILAN NEGERI CALANG
106	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA
107	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
108	PENGADILAN NEGERI KASONGAN
109	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU
110	PENGADILAN NEGERI KOTABARU
111	PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
112	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
113	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
114	PENGADILAN NEGERI LASUSUA
115	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
116	PENGADILAN NEGERI MENTOK
117	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
118	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
119	PENGADILAN NEGERI NATUNA

NO	SATUAN KERJA
120	PENGADILAN NEGERI NEGARA
121	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
122	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
123	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
124	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
125	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
126	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
127	PENGADILAN NEGERI RAHA
128	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
129	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
130	PENGADILAN NEGERI RUTENG
131	PENGADILAN NEGERI SANANA
132	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
133	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
134	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
135	PENGADILAN NEGERI SINABANG
136	PENGADILAN NEGERI SINGKIL
137	PENGADILAN NEGERI SINJAI
138	PENGADILAN NEGERI SOA-SIO
139	PENGADILAN NEGERI SUKADANA
140	PENGADILAN NEGERI TANJUNG
141	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
142	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB
143	PENGADILAN NEGERI TEBO
144	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
145	PENGADILAN NEGERI TUAL
146	PENGADILAN NEGERI UNAAHA
147	PENGADILAN NEGERI UNGARAN
148	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI
149	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
150	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

NO	SATUAN KERJA
151	PENGADILAN AGAMA CILACAP
152	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU
153	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
154	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
155	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
156	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
157	PENGADILAN AGAMA JAMBI
158	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA
159	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
160	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
161	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
162	PENGADILAN AGAMA MATARAM
163	PENGADILAN AGAMA PADANG
164	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
165	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
166	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
167	PENGADILAN AGAMA SEMARANG
168	PENGADILAN AGAMA SLAWI
169	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
170	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
171	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
172	PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR
173	PENGADILAN AGAMA BANGIL
174	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
175	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
176	PENGADILAN AGAMA BATANG
177	PENGADILAN AGAMA BATURAJA
178	PENGADILAN AGAMA BIMA
179	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
180	PENGADILAN AGAMA DEMAK
181	PENGADILAN AGAMA JOMBANG

NO	SATUAN KERJA
182	PENGADILAN AGAMA KALIANDA
183	PENGADILAN AGAMA KUDUS
184	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
185	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
186	PENGADILAN AGAMA LUWUK
187	PENGADILAN AGAMA MAGETAN
188	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
189	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
190	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
191	PENGADILAN AGAMA MUNGKID
192	PENGADILAN AGAMA PACITAN
193	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
194	PENGADILAN AGAMA PAREPARE
195	PENGADILAN AGAMA PINRANG
196	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
197	PENGADILAN AGAMA REMBANG
198	PENGADILAN AGAMA RENGAT
199	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
200	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
201	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN
202	PENGADILAN AGAMA TEGAL
203	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
204	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
205	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
206	PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
207	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
208	MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH
209	MAHKAMAH SYAR'ITYAH BLANGKAJEREN
210	MAHKAMAH SYAR'ITYAH KOTA SUBULUSSALAM
211	MAHKAMAH SYAR'ITYAH KUTACANE
212	MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

NO	SATUAN KERJA
213	MAHKAMAH SYAR'ITYAH TAPAK TUAN
214	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO
215	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
216	PENGADILAN AGAMA BANTAENG
217	PENGADILAN AGAMA BARRU
218	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN
219	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
220	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI
221	PENGADILAN AGAMA BONTANG
222	PENGADILAN AGAMA BOROKO
223	PENGADILAN AGAMA BUNTOK
224	PENGADILAN AGAMA BUOL
225	PENGADILAN AGAMA CILEGON
226	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP
227	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
228	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI
229	PENGADILAN AGAMA KANGEAN
230	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU
231	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
232	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN
233	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
234	PENGADILAN AGAMA LABUHA
235	PENGADILAN AGAMA LOLAK
236	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
237	PENGADILAN AGAMA MAGELANG
238	PENGADILAN AGAMA MALILI
239	PENGADILAN AGAMA MENTOK
240	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
241	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH
242	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
243	PENGADILAN AGAMA NABIRE

NO	SATUAN KERJA
244	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH
245	PENGADILAN AGAMA NEGARA
246	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
247	PENGADILAN AGAMA PAINAN
248	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG
249	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE
250	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI
251	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI
252	PENGADILAN AGAMA PARIGI
253	PENGADILAN AGAMA PENAJAM
254	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
255	PENGADILAN AGAMA PUTUSIBAU
256	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG
257	PENGADILAN AGAMA SANGGAU
258	PENGADILAN AGAMA SELAYAR
259	PENGADILAN AGAMA SERUI
260	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
261	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
262	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG
263	PENGADILAN AGAMA SINJAI
264	PENGADILAN AGAMA SOA SIO
265	PENGADILAN AGAMA SOREANG
266	PENGADILAN AGAMA SUKADANA
267	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
268	PENGADILAN AGAMA TANJUNG
269	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI
270	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN
271	PENGADILAN AGAMA TARAKAN
272	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN
273	PENGADILAN AGAMA TOLI-TOLI
274	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1403/DJA/HM1.1/VIII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Himbauan Publikasi dan Kampanye
SPI Mahkamah Agung 2025

06 Agustus 2025

Yth.

- 1.Ketua Pengadilan Tingkat Banding Terlampir
- 2.Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Terlampir
di Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr Wb

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 14358/SEK/PW1.1.1/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Publikasi QR Code Survei Penilaian Integritas 2025, sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diminta Saudara untuk mempublikasikan QR Code pengisian survei melalui tautan berikut <https://bit.ly/EKS-SPIMARI25> di area pelayanan sampai dengan 30 Oktober 2025.

Demikian untuk segera dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

a.n Direktur Jenderal,
Badan Peradilan Agama



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ARIEF HIDAYAT
NIP. 196809041993031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**DAFTAR SATUAN KERJA
SAMPEL ACAK SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

1. Pengadilan Tinggi Agama Bandung
2. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
3. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
4. Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
5. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
6. Pengadilan Tinggi Agama Semarang
7. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
8. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
9. Pengadilan Agama Banjarnegara
10. Pengadilan Agama Bojonegoro
11. Pengadilan Agama Cilacap
12. Pengadilan Agama Indramayu
13. Pengadilan Agama Jakarta Barat
14. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
15. Pengadilan Agama Jakarta Timur
16. Pengadilan Agama Jakarta Utara
17. Pengadilan Agama Jambi
18. Pengadilan Agama Jayapura
19. Pengadilan Agama Kab Kediri
20. Pengadilan Agama Kab Malang
21. Pengadilan Agama Majalengka
22. Pengadilan Agama Mataram
23. Pengadilan Agama Padang
24. Pengadilan Agama Palembang
25. Pengadilan Agama Pekalongan
26. Pengadilan Agama Pontianak
27. Pengadilan Agama Semarang
28. Pengadilan Agama Slawi
29. Pengadilan Agama Tigaraksa
30. Pengadilan Agama Tulungagung
31. Pengadilan Agama Watampone
32. Pengadilan Agama Arga Makmur
33. Pengadilan Agama Bangil
34. Pengadilan Agama Bangkinang
35. Pengadilan Agama Banyumas
36. Pengadilan Agama Batang
37. Pengadilan Agama Baturaja
38. Pengadilan Agama Bima
39. Pengadilan Agama Bukit Tinggi
40. Pengadilan Agama Demak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

41. Pengadilan Agama Jombang
42. Pengadilan Agama Kalianda
43. Pengadilan Agama Kudus
44. Pengadilan Agama Limboto
45. Pengadilan Agama Lubuk Linggau
46. Pengadilan Agama Luwuk
47. Pengadilan Agama Magetan
48. Pengadilan Agama Martapura
49. Pengadilan Agama Mempawah
50. Pengadilan Agama Muara Enim
51. Pengadilan Agama Mungkid
52. Pengadilan Agama Pacitan
53. Pengadilan Agama Pamekasan
54. Pengadilan Agama Pare-pare
55. Pengadilan Agama Pinrang
56. Pengadilan Agama Purworejo
57. Pengadilan Agama Rembang
58. Pengadilan Agama Rengat
59. Pengadilan Agama Situbondo
60. Pengadilan Agama Sungailiat
61. Pengadilan Agama Tanjung Pandan
62. Pengadilan Agama Tegal
63. Pengadilan Agama Temanggung
64. Pengadilan Agama Tenggara
65. Pengadilan Agama Trenggalek
66. Pengadilan Agama Watansoppeng
67. Pengadilan Agama Wonogiri
68. Mahkamah Syar'iyah Aceh
69. Mahkamah Syar'iyah Balangkajeren
70. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
71. Mahkamah Syar'iyah Kutacane
72. Mahkamah Syar'iyah Sigli
73. Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan
74. Pengadilan Agama Andolo
75. Pengadilan Agama Banjarbaru
76. Pengadilan Agama Bantaeng
77. Pengadilan Agama Barru
78. Pengadilan Agama Bintuhan
79. Pengadilan Agama Blambangan Umpu
80. Pengadilan Agama Bolaang Uki
81. Pengadilan Agama Bontang
82. Pengadilan Agama Boroko
83. Pengadilan Agama Buntok
84. Pengadilan Agama Buol
85. Pengadilan Agama Cilegon
86. Pengadilan Agama Dabo Singkep
87. Pengadilan Agama Giri Menang
88. Pengadilan Agama Gunung Sitoli
89. Pengadilan Agama Kangean
90. Pengadilan Agama Kefamenanu
91. Pengadilan Agama Klungkung
92. Pengadilan Agama Kuala Kurun

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

93. Pengadilan Agama Labuan Bajo
94. Pengadilan Agama Labuha
95. Pengadilan Agama Lolak
96. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
97. Pengadilan Agama Magelang
98. Pengadilan Agama Malili
99. Pengadilan Agama Mentok
100. Pengadilan Agama Muara Labuh
101. Pengadilan Agama Muara Teweh
102. Pengadilan Agama Muko-muko
103. Pengadilan Agama Nabire
104. Pengadilan Agama Nanga Pinoh
105. Pengadilan Agama Negara
106. Pengadilan Agama Padang Panjang
107. Pengadilan Agama Painan
108. Pengadilan Agama Pandeglang
109. Pengadilan Agama Pangkajene
110. Pengadilan Agama Pangkalan Balai
111. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
112. Pengadilan Agama Parigi
113. Pengadilan Agama Penajam
114. Pengadilan Agama Prabumulih
115. Pengadilan Agama Putusibau
116. Pengadilan Agama Rangkas Bitung
117. Pengadilan Agama Sanggau
118. Pengadilan Agama Selayar
119. Pengadilan Agama Serui
120. Pengadilan Agama Sibolga
121. Pengadilan Agama Sijunjung
122. Pengadilan Agama Singkawang
123. Pengadilan Agama Sinjai
124. Pengadilan Agama Soasio
125. Pengadilan Agama Soreang
126. Pengadilan Agama Sukadana
127. Pengadilan Agama Sungai Penuh
128. Pengadilan Agama Tanjung
129. Pengadilan Agama Tanjung Balai
130. Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
131. Pengadilan Agama Tarakan
132. Pengadilan Agama Tembilahan
133. Pengadilan Agama Toli-toli
134. Pengadilan Agama Tulang Bawah Tengah

a.n Direktur Jenderal,
Badan Peradilan Agama



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ARIEF HIDAYAT
NIP. 196809041993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

